



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.535, 2014

**KEMENHUT. Kerjasama Oprasi. Izin Usaha.
Pemanfaatan. Hukum Kayu. Hutan Tanam.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.22/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI PADA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012 telah ditetapkan ketentuan Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;**
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tindak lanjut dari Pasal 92 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang mengatur norma larangan bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi izin;**

- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dimana ketentuan norma larangan mengontrakkan atau Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tidak diatur lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ketentuan Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012 tidak memiliki acuan Peraturan Pemerintahnya;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA
OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2012.**

Pasal 1

**Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005
tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012.**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN